KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

(Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi)

Toto Sugiarto Sidi^{*1}, Husnah Katjina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: totosugiartosidi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-September 2022. Hasil penelitian menunjukkan Kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 14,96% per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun kontribusinya dalam kategori kecil dan untuk kontribusi retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 2,7% per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun kontribusinya dalam kategori cukup.

Kata kunci: *Kontribusi Pajak Daerah , Retribusi Daerah, APBD.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of contribution of regional taxes and regional levies in the 2016 to 2020 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the Wakatobi Regency Government. The research method used is descriptive quantitative. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Wakatobi Regency, which is located in Southeast Sulawesi Province. The research was conducted in February-September 2022. The results showed that the contribution of local taxes to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the 2016 to 2020 period averaged 14.96% per year. This shows that local taxes have a contribution to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) although their contribution is in the small category and for the contribution of regional levies to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the 2016 to 2020 period an average of 2.7% per year. . This shows that regional retribution has a contribution to the Regional Budget (APBD) even though its contribution is in the sufficient category.

Keywords: *contribution of local taxes, regional levies, APBD.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang ini dibagi menjadi beberapa negara bagian, masing-masing terdiri dari kabupaten dan kota. Dari berbagai daerah di Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkan Undang-Undang yang sudah beberapa kali direvisi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, otonomi merupakan dasar hukum dalam pelaksanaannya dan memberikan kebebasan kepada kabupaten atau pemerintah daerah mengatur diri sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangannya mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah baik dengan memperkuat sumber daya baik fisik maupun non fisik di wilayahnya yang dapat mendukung belanja daerah. Pemberian otonomi daerah yang luas, praktis, dan akuntabel berarti dalam memberikan otonomi kepada daerah, daerah harus mengatur dan mengendalikannya. Artinya, kemampuan mempertanggungjawabkan kemajuan pembangunan harus benar-benar diperhatikan. Target Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pelaksanaannya memerlukan peran aktif atau partisipatif seluruh masyarakat.

Aliran pendapatan daerah diperlukan untuk mengelola pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah adalah bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan dari daerah itu sendiri. Daerah dengan potensi tinggi dan bisa dikelola dengan baik maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan tinggi, sedangkan daerah yang mempunyai sedikit potensi dan tidak mampu dikelola dengan baik maka perkembangan daerahnya juga akan lambat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari sumber-sumber dalam wilayah suatu wilayah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud desentralisasi bertujuan agar pemerintah daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan keagenan, BUMN, dll, dihitung dalam Rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan dari daerah dan harus ditingkatkan untuk mendukung berlangsungnya biaya kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan asli daerah. Besaran pendapatan dari dinas pajak dan retribusi daerah masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan dan administrasi masing-masing daerah.

Perpajakan merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Pajak bersifat wajib, tetapi pemungutan, pemungutan dan pemungutan pajak oleh negara dan pemerintah memiliki aturan dan tidak sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 (Perubahan), yang menyatakan bahwa semua pajak untuk keperluan pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang sangat potensial serta merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah mengingat sumbangannya yang diharapkan cukup signifikan dalam memenuhi pembiayaan pemerintah daerah. Retribusi daerah ini merupakan sumber PAD yang diperoleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Perbedaan yang jelas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada pertimbangan pemerintah negara bagian. Dimana pajak daerah tidak dibayarkan secara langsung, pajak daerah dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar pajak daerah. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas dan melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wakatobi yang cukup banyak, baik di bidang pariwisata, perhotelan atau pendidikan, tidak heran jika banyak pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi maupun swasta. Apa lagi potensi sumber daya alamnya yang begitu bagus seperti bidang pariwisata dan kulinernya yang membuat orang-orang tertarik berkunjung ke Kabupaten Wakatobi, dari hasil kekayaan alam itu akan menambah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wakatobi secara terus menerus, dan kemudian disalurkan lagi untuk pembangunan daerah. Dari pemasukkan tersebut seharusnya dan semestinya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah suatu taksiran atau perkiraan tentang keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang Anggaran Daerah sebagai dasar untuk memahami maksud dan

tujuan dari anggaran tersebut. Pengertian anggaran itu mengandung makna suatu perkiraan tentang keuangan dengan menekankan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diharapkan akan diterima dan dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu (biasanya setahun).

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD adalah tulang punggung pendanaan daerah, sehingga kemampuannya menjalankan perekonomian diukur dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerahnya terhadap APBD-nya. Pemerintah daerah dengan dukungan negara. (Mahendra Putra dan Urupui, 2015)

2.3 Manajemen Pendapatan Daerah

Mahmudi dalam Risnawati (2013), agar suatu kotamadya dapat mengelola pendapatannya secara optimal, terlebih dahulu harus mengidentifikasi sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bidang: Pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, dan kedua, sumber pendapatan masa depan yang mungkin atau mungkin tidak dapat dicapai hanya melalui upaya tertentu. Selain mengidentifikasi aliran pendapatan, tugas penting lainnya bagi pemerintah daerah adalah menciptakan aliran pendapatan baru. Aliran pendapatan baru ini dapat dihasilkan, misalnya melalui inovasi program ekonomi lokal, program kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta, dll.

2.4 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

a. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Negara dan Bea Masuk Negara Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pembagian jenis pajak negara sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.5 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan bersama bagi semua bentuk pemerintahan daerah, dan beberapa daerah menggunakan retribusi sebagai sumber pendapatan utama daerahnya. Retribusi menurut Sugiono (2010) adalah pungutan atau biaya untuk pembayaran layanan berlisensi tertentu yang disediakan oleh pemerintah khusus untuk kepentingan individu atau organisasi.

Jenis-jenis Retribusi daerah, seperti halnya jenis retribusi daerah, klasifikasi jenis retribusi daerah tidak didasarkan pada tingkat pemerintahan (pemerintah negara bagian atau kabupaten/kota). Penetapan pihak mana yang dapat mengenakan jenis retribusi daerah ditentukan oleh penyelenggaraan dan kewenangan pemerintah negara bagian atau kabupaten/kota. Pemerintah negara bagian dan provinsi/kabupaten kota. Dalam kasus-kasus tertentu, jika Keputusan tersebut tidak berlaku secara sah, pemungut pajak akan memutuskan siapa yang akan memberikan layanan. Misalnya, jika layanan rekondisi tidak dapat dilakukan secara efektif oleh kabupaten/kota, retribusi dapat dikenakan oleh pemerintah negara bagian ketika layanan rekondisi disediakan oleh pemerintah negara bagian. Pemerintah daerah dapat mengenakan jenis pajak daerah berikut ini:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- a. Retribusi pelayanan untuk layanan medis.
- b. Retribusi pelayanan untuk persampahan/layanan kebersihan.
- c. Penggantian biaya pencetakan tanda pengenalan dan akta catatan sipil.
- d. Biaya pemakaman dan kremasi.
- e. Retribusi atas pelayanan parkir di jalan umum.
- f. Retribusi untuk layanan pasar.
- g. Biaya retribusi pengujian kendaraan.
- h. Biaya Pengawasan Kendaraan Bermotor.
- i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- j. Retribusi penggantian biaya pencetakan peta.
- k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- l. Retribusi atas pembuangan limbah cair.
- m. Retribusi untuk rekondisi layanan atau tera/tera ulang.
- n. Retribusi pelayanan pendidikan.
- o. Biaya pemeliharaan menara komunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi penggunaan kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau toko
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat Parkir Khusus
- f. Retribusi tempat penginapan/resort/villa
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi layanan pelabuhan
- i. Retribusi tempat untuk Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi penyeberangan di air
- k. Retribusi untuk penjualan produk ekonomi local

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis izin khusus adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin usaha tempat berjualan minuman beralkohol

- c. Retribusi izin pengalihan
- d. Retribusi izin rute/trayek
- e. Retribusi izin perikanan

2.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah di Indonesia kini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat yang harus diikuti oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dasar hukum pemungutan pajak kota di kabupaten atau kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Keputusan No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah.
5. Keputusan gubernur/walikota untuk mengatur pajak daerah sebagai aturan untuk melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah di prefektur/kota yang ditunjuk.

2.7 Azas Pemungutan Pajak Daerah

Merujuk pada UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 49 pemungutan merupakan “suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran”.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Wakatobi tahun 2016-2020.

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian yang sebenarnya. Oleh karena itu, sampe yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan mengenai keadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau dalam bentuk angka-angka yang berhubungan dengan data-data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang biasa digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau data langsung berasal dari sumbernya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), Nur Indriantoro dalam Rasni (2017). Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah terusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memiliki data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu harus digunakan dalam memproses pengumpulan data dimana di dalamnya terdapat informasi untuk diterima peneliti baik bentuk lisan maupun tulisan, sehingga untuk mengumpulkan data yang relevan pada pengenalan permasalahan, yakni:

1. Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. dalam wawancara terdapat instrumen yang baru, wawancara yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan salah satu staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Wakatobi.
2. Dokumentasi adalah metode yang lebih mudah dilakukan metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Objek yang diamati pada metode dokumentasi kesalahan benda hidup melainkan benda mati. Dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2016 sampai 2020.

3. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif, cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Metode ini mengedepankan deskripsi yang memungkinkan kamu untuk belajar dari hal lalu. Dalam penelitian ini setelah data sudah terkumpul maka selanjutnya akan diolah menggunakan rumus, agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

- a. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan Pajak Daerah

Q_x = Penerimaan Pajak Daerah pada tahun tertentu

Q_y = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu

Untuk mengetahui besarnya nilai kontribusi pajak daerah pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

80% - 100% : Besar Sekali

60% - 79% : Besar

40% - 59% : Cukup Besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

Menurut Abdul Halim dalam Alvos Wahyu Sarjuni (2017), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi daerah pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir dalam Rasni (2017:44) adalah sebagai berikut:

- 0% - 0,9% = relatif tidak berkontribusi
- 1% - 1,9% = kurang memiliki kontribusi
- 2% - 2,9% = cukup memiliki kontribusi
- 3% - 3,9% = memiliki kontribusi
- Lebih dari 4% = sangat memiliki kontribusi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Tahun	Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah (Rp)
	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	
2016	25.029.145.425	655.542.811.799	64.762.816.072	745.334.773.296
2017	46.657.108.389	605.126.627.170	96.974.088.085	748.730.823.644
2018	33.554.440.213	684.569.385.404	101.052.250.122	819.176.075.739
2019	36.159.779.721	742.396.642.890	134.094.625.723	912.651.048.334
2020	35.888.950.930,80	673.824.024.001	137.876.659.346	847.589.634.277,80

Sumber data: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 -2020.

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas, pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ketahun. Dari tabel diatas juga menunjukkan ketidakstabilan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang kemudian mempengaruhi total dari Pendapatan Daerah

itu sendiri.

Dalam suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Penerimaan lainnya. Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut akan dilihat seberapa besar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi disesuaikan dengan keadaan potensi daerah. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak daerah adalah:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan
6. Pajak hiburan
7. Pajak parkir
8. Bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB)

Untuk menghitung besar tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD, dapat menggunakan rumus kontribusi.. Dengan menggunakan rumus kontribusi maka akan diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

4.1.1 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2016, yaitu sebesar:
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 5.880.355.181}{\text{Rp } 25.029.145.425} \times 100\% = 23,49\%$$
2. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, yaitu sebesar:
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.083.295.551}{\text{Rp } 46.657.108.389} \times 100\% = 15,18\%$$
3. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2018, yaitu sebesar:
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.817.405.574}{\text{Rp } 33.554.440.213} \times 100\% = 23,29\%$$
4. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2019, yaitu sebesar:
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.431.032.570}{\text{Rp } 36.159.779.721} \times 100\% = 20,55\%$$
5. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2020, yaitu sebesar:
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 6.078.245.041}{\text{Rp } 35.888.950.930,80} \times 100\% = 16,93\%$$

Untuk lebih jelasnya disajikan kedalam tabel yang dapat dilihat dalam kolom tabel dibawah.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2016	5.880.355.181	25.029.145.425	23,49	Cukup
2017	7.083.295.551	46.657.108.389	15,18	Kecil
2018	7.817.405.574	33.554.440.213	23,29	Cukup
2019	7.431.032.570	36.159.779.721	20,55	Cukup
2020	6.078.245.041	35.888.950.930,80	16,93	Kecil

Sumber data: Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 sampai 2020.

Pada Tabel 2 kontribusi pajak daerah terhadap PAD diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2016 sampai 2017 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan sampai 15,18% termasuk dalam kategori kecil, pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan sampai 23,29% termasuk dalam kategori cukup hingga akhirnya kemudian mengalami penurunan terus menerus sampai pada tahun 2020 menjadi 16,93% termasuk dalam kategori kecil.

Demikian pula untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2016, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 966.380.565}{\text{Rp } 25.029.145.425} \times 100\% = 3,8\%$$

2. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.369.887.361}{\text{Rp } 46.657.108.389} \times 100\% = 2,9\%$$

3. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2018, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.911.050.797}{\text{Rp } 33.554.440.213} \times 100\% = 5,6\%$$

4. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2019, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.037.606.239}{\text{Rp } 36.159.779.721} \times 100\% = 2,8\%$$

5. Kontribusi retribusi daerah pada PAD Kabupaten Wakatobi tahun 2020, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.012.229.159}{\text{Rp } 35.888.950.930,80} \times 100\% = 2,8\%$$

Untuk lebih jelasnya disajikan kedalam tabel yang dapat dilihat dalam kolom tabel dibawah.

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	966.380.565	25.029.145.425	3,8	Memiliki Kontribusi
2017	1.369.887.361	46.657.108.389	2,9	Cukup Memiliki Kontribusi
2018	1.911.050.797	33.554.440.213	5,6	Sangat Memiliki Kontribusi
2019	1.037.606.239	36.159.779.721	2,8	Cukup Memiliki Kontribusi
2020	1.012.229.159	35.888.950.930,80	2,8	Cukup Memiliki Kontribusi

Sumber data: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2020.

Pada Tabel 3 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah Kabupaten Wakatobi dari 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan, tidak sampai pada kriteria kurang rata-rata sampai kriteria cukup dan bahkan sampai pada kriteria sangat memiliki kontribusi. Di tahun 2016 kontribusi retribusi daerah memiliki kriteria memiliki kontribusi dengan 3,8%. Pada tahun 2017 kontribusi retribusi daerah memiliki kriteria cukup memiliki kontribusi dengan 2,9%. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi daerah memiliki kriteria sangat memiliki kontribusi dengan 5,6%, ini merupakan kontribusi retribusi daerah paling tinggi. Untuk tahun 2019 sampai 2020 kontribusi retribusi daerah memiliki kesamaan kriteria yaitu cukup memiliki kontribusi dengan 2,8%.

Tinggi rendahnya kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Wakatobi ini disebabkan oleh jumlah objek pajak dan retribusi yang

masih relatif sedikit. Dilihat dari proses pertumbuhannya, Kabupaten Wakatobi belum terlalu banyak objek pajak dan retribusi daerah yang bisa menunjang penerimaan pajak dan retribusi daerah.

4.1.2 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas komponen pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing dari komponen ini terbagi atas beberapa sub koponen pendapatan dan belanja daerah.

Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Kabupaten Wakatobi tercermin dalam APBDnya, yang dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Untuk memperbesar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD harus terlebih dahulu meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2016, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 5.880.355.181}{\text{Rp } 48.472.233.957} \times 100\% = 12,13\%$$

2. Kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.083.295.551}{\text{Rp } 33.117.736.328} \times 100\% = 21,38\%$$

3. Kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2018, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.817.405.574}{\text{Rp } 44.091.055.266} \times 100\% = 17,73\%$$

4. Kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2019, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.431.032.570}{\text{Rp } 67.998.987.234} \times 100\% = 10,92\%$$

5. Kontribusi pajak daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2020, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 6.078.245.041}{\text{Rp } 47.977.258.601,80} \times 100\% = 12,66\%$$

Untuk lebih jelasnya disajikan kedalam tabel yang dapat dilihat dalam kolom tabel dibawah.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2016	5.880.355.181	48.472.233.957	12,13	Kecil
2017	7.083.295.551	33.117.736.328	21,38	Cukup
2018	7.817.405.574	44.091.055.266	17,73	Kecil
2019	7.431.032.570	67.998.987.234	10,92	Kecil
2020	6.078.245.041	47.977.258.601,80	12,66	Kecil

Sumber data: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016- 2020.

Pada Tabel 4 kontribusi pajak daerah terhadap APBD diatas dapat menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 pajak daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kategori kecil yaitu sebesar 12,13%. Pada tahun 2017 pajak daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kategori cukup yaitu sebesar 21,38%, pada tahun ini sempat mengalami kenaikan walaupun tidak lumayan besar. Pada tahun 2018 pajak daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kategori kecil yaitu sebesar 17,73%, pada tahun ini kembali lagi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pajak daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kategori kecil yaitu sebesar 10,92%, pada tahun ini mengalami penurunan bahkan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pajak daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kategori kecil yaitu sebesar 12,66%, pada tahun ini tingkat kontribusinya sedikit meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis besar tingkat kontribusi pajak daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi tahun 2016 sampai 2020 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 14,96% yang berarti bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi. Pajak Daerah dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah walaupun kontribusinya hanya kecil.

Demikian pula untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah pada

APBD Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2016, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 966.380.565}{\text{Rp } 48.472.233.957} \times 100\% = 1,9\%$$

2. Kontribusi retribusi daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.369.887.361}{\text{Rp } 33.117.736.328} \times 100\% = 4,1\%$$

3. Kontribusi retribusi daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2018, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.911.050.797}{\text{Rp } 44.091.055.266} \times 100\% = 4,3\%$$

4. Kontribusi retribusi daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2019, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.037.606.239}{\text{Rp } 7.998.987.234} \times 100\% = 1,5\%$$

5. Kontribusi retribusi daerah pada APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2020, yaitu sebesar:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.012.229.159}{\text{Rp } 47.977.258.601,80} \times 100\% = 2,1\%$$

Untuk lebih jelasnya disajikan kedalam tabel yang dapat dilihat dalam kolom tabel dibawah.

Tabel 5 Kontribusi Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 sampai 2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	966.380.565	48.472.233.957	1,9	Kurang Memiliki Kontribusi
2017	1.369.887.361	33.117.736.328	4,1	Sangat Memiliki Kontribusi
2018	1.911.050.797	44.091.055.266	4,3	Sangat Memiliki Kontribusi
2019	1.037.606.239	67.998.987.234	1,5	Kurang Memiliki Kontribusi
2020	1.012.229.159	47.977.258.601,80	2,1	Cukup Memiliki Kontribusi

Sumber data: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2020.

Pada Tabel 5 kontribusi retribusi daerah terhadap APBD diatas dapat menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kriteria kurang memiliki kontribusi yaitu sebesar 1,9%. Pada tahun 2017 retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kriteria sangat memiliki kontribusi yaitu sebesar 4,1%, pada tahun ini tingkat kontribusinya sangat meningkat. Pada tahun 2018 retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan

kriteria sangat memiliki kontribusi yaitu sebesar 4,3%. Pada tahun 2019 retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kriteria kurang memiliki kontribusi yaitu sebesar 1,5%, pada tahun ini mengalami penurunan yang sangat rendah bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi pada APBD dengan kriteria cukup memiliki kontribusi yaitu sebesar 2,1%, pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tinggi rendahnya kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD di Kabupaten Wakatobi ini disebabkan oleh jumlah objek pajak dan retribusi yang masih relatif sedikit. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi perlu memperbaiki atau *up dating data base* wajib pajak setiap tahunnya selain itu harus dilakukan penggalan potensi pajak yang belum digali serta melakukan sosialisasi pajak secara memadai agar informasi tentang pajak ini dapat diketahui oleh masyarakat.

Dari hasil analisis besar tingkat kontribusi retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi tahun 2016 sampai 2020 diatas dapat kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 2,7% yang berarti bahwa Retribusi Daerah cukup memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi. Retribusi Daerah dari tahun 2016 sampai 2020 cukup memiliki kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, analisis data dan pembahasan mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 14,96% per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun kontribusinya dalam kategori kecil. Kontribusi retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 2,7% per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun kontribusinya dalam kategori cukup.

6. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti mendatang ialah:

- 1) Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 diketahui bahwa besar tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah cukup dan bahkan kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi sangat perlu diperhatikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk selalu berkomitmen mencapai target-target yang ada dengan mempererat kerjasama dengan pengusaha swasta untuk meningkatkan penanaman modal di wilayah Kabupaten Wakatobi.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi perlu memperbaiki atau *up dating data base* wajib pajak setiap tahunnya dan harus dilakukan penggalian potensi pajak yang belum digali serta melakukan sosialisasi pajak secara memadai agar informasi tentang pajak ini dapat diketahui oleh masyarakat.
- 3) Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode penelitian, misalnya enam tahun terakhir atau lebih agar hasil yang diperoleh lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, bagi penelitian mendatang hendaknya sampel diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada pajak daerah dan retribusi daerah saja, tetapi mencakup aspek-aspek yang lain agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Mahendra Putra, P., & Ulupui, I. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi, 11(3), 863-877
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Rasni. 2017. *Kontribusi dan Eektivitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Muhammadiyah Buton.
- Risnawati. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi*. Universitas Muhammadiyah Buton.
- Sarjuni, Alvos Wahyu. 2017. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta